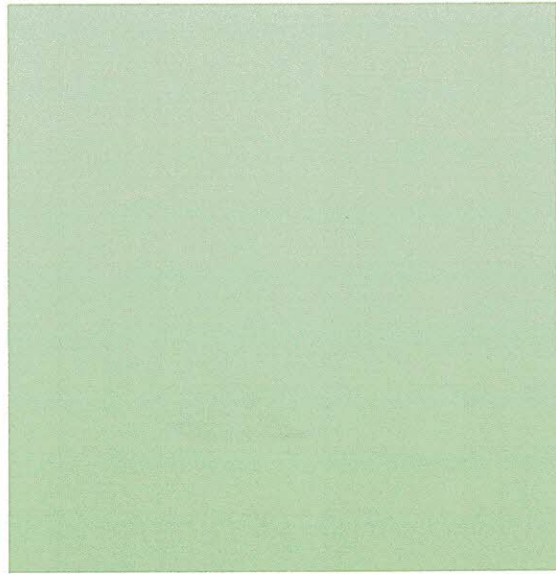




# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami aturkan kehadiran Allah Swt, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah dan Penelitian Pengembangan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 -2021 dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Akhirnya kami menyadari LKjIP BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu kami berharap ada kerjasama, evaluasi dan masukan demi penyempurnaan LKjIP BAPPEDA LITBANG dimasa mendatang.

Taliwang,     Maret 2021

Kepala Bappeda Litbang  
Kabupaten Sumbawa Barat,



drh. Hairul, MM

NIP. 19750507 200212 1 003





DAFTAR ISI

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                                     | i  |
| DAFTAR ISI .....                                         | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                                 | 1  |
| A. Latar Belakang. ....                                  | 1  |
| B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD ..... | 1  |
| C. Isu-isu Strategis dan Permasalahan .....              | 8  |
| BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....         | 10 |
| A. Rencana Srategis (Renstra) .....                      | 10 |
| B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....                   | 14 |
| C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....                   | 18 |
| D. Perjanjian Kinerja (PK) .....                         | 18 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....                     | 25 |
| A. Capaian Kinerja .....                                 | 25 |
| B. Realisasi Anggaran .....                              | 33 |
| BAB IV. PENUTUP .....                                    | 45 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Salah satu karakteristik dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah adanya mekanisme akuntabilitas perangkat daerah kepada seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah memiliki kewajiban dalam menyusun dan menyampaikan laporan kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disampaikan secara berkala berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati. Laporan yang menjadi kewajiban tahunan ini memuat pengukuran kinerja perangkat daerah yang merupakan salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan kinerja disusun dengan maksud sebagai bentuk akuntabilitas kinerja



Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Adapun tujuan pelaporan kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

#### 1.4. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 40 Tahun 2017 terdiri dari:

##### 1. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- 2) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- 3) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- 6) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK);
- 7) Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) ; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dipimpin oleh Sekretaris Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Badan wajib menerapkan prinsip

dalam lingkungan Bappeda Litbang maupun dengan unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Badan wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Badan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### **1.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.**

#### **a. Tugas:**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

#### **b. Fungsi:**

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat Badan dan pendokumentasian Kegiatan Badan;
- 3) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- 4) Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- 5) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- 6) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
- 7) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris ;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- 9) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris.
- 10) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan badan;
- 11) Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;



### 1.3. Sub Bagian Koordinasi Penyusunan Program

a. Tugas:

Sub Bagian koordinasi penyusunan program mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program.

b. Fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
- 2) Merencanakan bahan kebijakan koordinasi penyusunan program;
- 3) Merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang koordinasi penyusunan program;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- 5) Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan badan;
- 6) Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan;
- 7) Melakukan fasilitasi, koordinasi dan melaksanakan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- 9) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Koordinasi Penyusunan Program;
- 10) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

### 3. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana dan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

### 4. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

- kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 13) Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
  - 14) Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
  - 15) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  - 16) Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  - 17) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas subbagian Umum dan Kepegawaian
  - 18) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - 19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## 1.2. Sub Bagian Keuangan

### a. Tugas:

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan.

### b. Fungsi:

- 1) Melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja subbagian keuangan;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin maupun pegawai;
- 3) Melaksanakan penyusunan prognosis realisasi keuangan;
- 4) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- 5) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- 6) Merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang dan menganalisis bahan kebijakan bidang keuangan;
- 7) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- 8) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan;
- 9) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;



Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

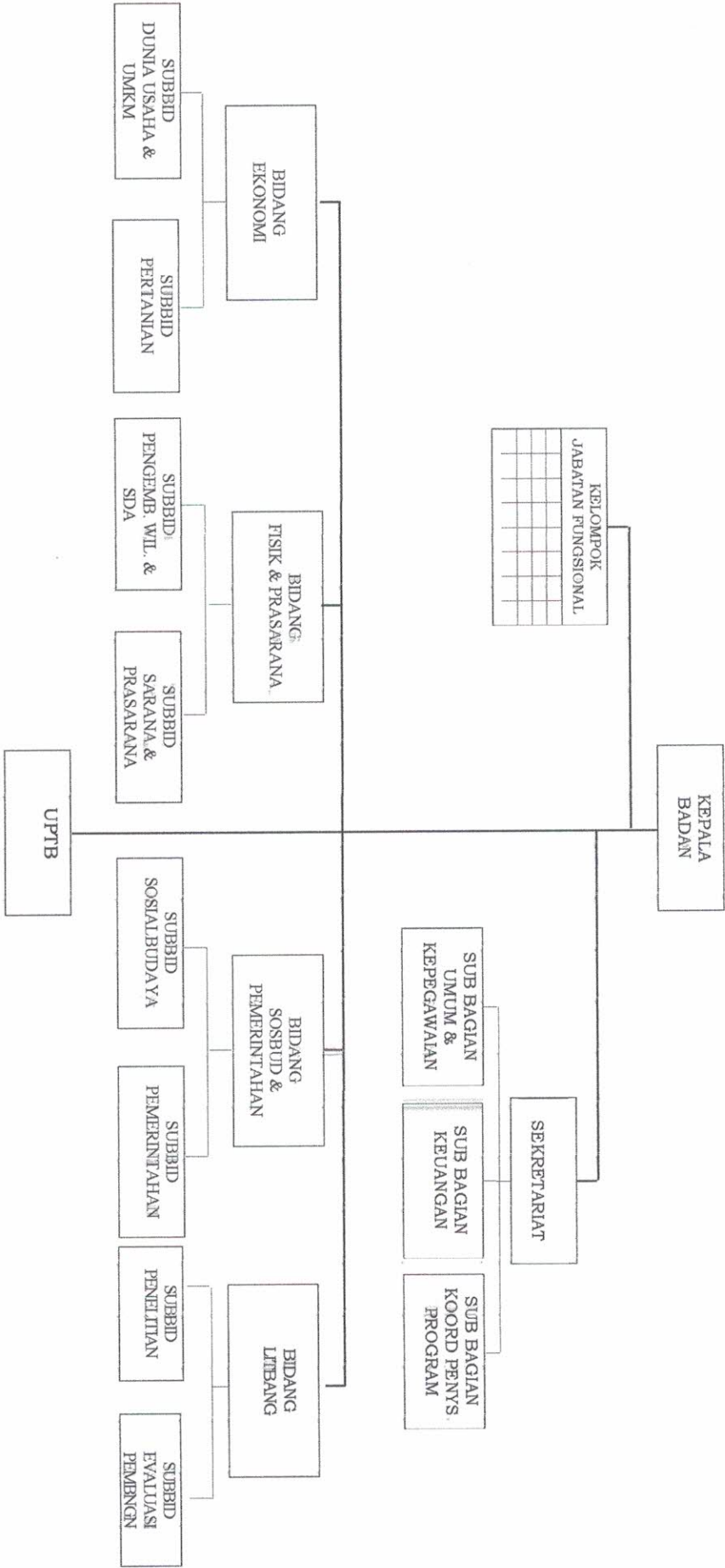
#### **5. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan serta melaksanakan perencanaan umum dan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah, pengembangan wilayah, SDA (Sumber Daya Alam), Lingkungan Hidup.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN





## 1.5. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam hal perencanaan pembangunan, Bappeda Litbang masih menghadapi beberapa isu strategis dan permasalahan sebagai berikut:

### 1.5.1. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan membutuhkan analisis terhadap berbagai isu strategis. Bappeda Litbang sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting di dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, analisis isu strategis merupakan langkah awal di dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda Litbang, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka terdapat 2 (dua) isu strategis Bappeda Litbang, yakni pertama, belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan *output*, *outcome* yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah; kedua: belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

#### 1.5.2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

- a. Belum terbangunnya sistem informasi data pembangunan yang menyeluruh;
- b. Belum optimalnya Analisa usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga masih terjadi ketidakselarasan sebagian output dan outcome yang dihasilkan;
- c. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2021.

#### 1. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis

##### a. Tujuan

*Tujuan* yang ingin dicapai oleh BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat selama Tahun 2018 s/d 2021 yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”.

##### b. Sasaran

*Sasaran* yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat yaitu dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan yang dapat memberikan arah, menggambarkan tujuan yang ingin dicapai, dan memberikan fokus terhadap Indikator yang akan dicapai serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Pernyataan Sasaran merupakan gambaran tentang kegiatan utama organisasi. Sasaran adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi dan tidak menyimpang dari Tujuan yang ditetapkan agar Program dan Kegiatan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun **Sasaran** tersebut yaitu:

- a. Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi
- b. Meningkatnya Keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang sosial Budaya
- c. Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana

d. Meningkatnya kemajuan pengembangan perencanaan dan penelitian.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa Barat. Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa Barat.

**c. Program dan Kegiatan Prioritas 2020**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi
  - Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
  - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
  - Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional
  - Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5. Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
  - Kegiatan Pengurusan Administrasi Keuangan
  - Verifikasi Keuangan SKPD
6. Program Peningkatan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah



- Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
  - Kegiatan Penyusunan Renja SKPD
  - Kegiatan Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
  - Kegiatan Penyusunan PK dan RA
  - Kegiatan Penyusunan Profil Perangkat Daerah
  - Kegiatan Penyusunan SOP
  - Kegiatan Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
7. Program Pengembangan Penelitian dan Pengkajian
- Kegiatan Pengembangan Penelitian Masyarakat
  - Kegiatan Kerjasama Pengembangan Penelitian Kebijakan Daerah
  - Kegiatan Pengurusan Ijin Penelitian
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Penyusunan RKPD
  - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD
  - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
  - Kegiatan Penyusunan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perencana Daerah
  - Kegiatan Penyusunan RPJMD
  - Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
  - Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Peningkatan Koordinasi Dunia Usaha dan UMKM
- Kegiatan Penyusunan Profil Ekonomi Daerah
  - Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Bumdes
  - Kegiatan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pedesaan
  - Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
  - Kegiatan Penegakan Ketentuan Cukai Rokok
  - Kegiatan Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM
  - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Dunia Usaha dan UMKM

10. Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pertanian dan Perikanan
  - Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan P2KPDT (Program Kawasan Produksi Daerah Tertinggal )
  - Kegiatan Penyelarasan Kerjasama Penanganan Daerah Rawan Pangan
  - Kegiatan Penyelarasan Kegiatan Pengusahaan Komoditas Unggulan
  - Kegiatan Penyelarasan implementasi rencana tindak one village one produk
  - Kegiatan Penyelarasan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi
  - Kegiatan Pertanian dan Perikanan Pengelolaan Database SIM Ekonomi
11. Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam
  - Kegiatan penyelarasan perencanaan, SDA
  - Kegiatan Penyelarasan Perencanaan Kebencanaan
  - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Pengwil dan SDA
  - Kegiatan Penyelarasan Pemanfaatan dan Pengendalian Perencanaan
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA
12. Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
  - Kegiatan Penyelarasan Perencanaan, monitoring dan evaluasi sub bidang sarana dan prasarana
  - Kegiatan Penyelarasan pengembangan air minum dan sanitasi masyarakat
  - Kegiatan Penyelarasan DAK Infrastruktur
  - Kegiatan Penyelarasan Jasa Konstruksi
  - Kegiatan Penyelarasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
13. Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Sosial Budaya
  - Kegiatan Pengendalian Rencana Aksi Sustainable Development Goal (RAD SDGs) KSB Development Goal (RAD SDGs) KSB



- Kegiatan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
  - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya
  - Kegiatan Penyelarasan Bidang Kesehatan
  - Kegiatan Penyelarasan Bidang Pendidikan
  - Kegiatan Penyelarasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
14. Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pemerintah
- Kegiatan Penyelarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan
  - Kegiatan Penyelarasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah
  - Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang pemerintahan
  - Kegiatan penyelarasan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - Penyusunan Database Pemerintahan

## 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

### 2.2.1. Indikator Kinerja Utama

| No  | Kinerja Utama/ Sasaran Strategis/ Outcome                                                    | Indikator Kinerja Utama                                                                     | Target | Sumber Data                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                          | (3)                                                                                         | (4)    | (5)                                 |
| 1   | Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi                            | Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi                        | 100%   | Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi |
| 2   | Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang sosial budaya dan pemerintahan | Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan | 100%   | Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi |
| 3   | Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang fisik dan prasarana            | Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana            | 100%   | Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi |

| No  | Kinerja Utama/ Sasaran Strategis/ Outcome               | Indikator Kinerja Utama                              | Target | Sumber Data                         |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                  | (4)    | (5)                                 |
| 4   | Meningkatnya kualitas perencanaan dan penelitian daerah | Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah | 100%   | Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi |

| No | SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME                                                                   | INDIKATOR SASARAN                                                                           | SATUAN | RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                           | REALISASI 2019 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                            | 3                                                                                           | 4      | 5                                                                                                                                                                                                                           | 6              |
| 1  | Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi                            | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi                        | Persen | Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan ekonomi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan ekonomi yang disusun Bappeda Litbang dikali 100                                               | 100 %          |
| 2  | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | Persen | Jumlah Dokumen Bahan Pengambilan Kebijakan Sosial Budaya dan Pemerintahan yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan sosial Budaya dan pemerintahan yang disusun Bappeda Litbang dikali 100 | 100 %          |
| 3  | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Fisik dan Prasarana            | Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang Fisik dan Prasarana            | Persen | Jumlah Dokumen Bahan Pengambilan Kebijakan Fisik dan Prasarana yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen dibagi jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan Fisik dan Prasarana yang disusun Bappeda Litbang dikali 100        | 100 %          |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah                                      | Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah                                        | Persen | Jumlah Program Pengembangan Potensi Daerah dibagi Jumlah Program Dalam Prencanaan Daerah dikali 100                                                                                                                         | 100 %          |



## 2.2.2. Analisis Capaian Kinerja 2020

### 1. Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pada 9 Perangkat Daerah koordinasi bidang ekonomi pada Tahun 2020 mencapai 100 %. Capaian kinerja ini sama dengan tahun sebelumnya, adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 tidak mempengaruhi capaian kinerja.

### 2. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pada 23 Perangkat Daerah koordinasi bidang ekonomi pada Tahun 2020 mencapai 100 %. Capaian kinerja ini sama dengan tahun sebelumnya, adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 tidak mempengaruhi capaian kinerja.

### 3. Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Fisik dan Prasarana

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pada 7 Perangkat Daerah koordinasi bidang ekonomi pada Tahun 2020 mencapai 100 %. Capaian kinerja ini sama dengan tahun sebelumnya, adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 tidak mempengaruhi capaian kinerja.

### 4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah

Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah pada 38 Perangkat Daerah mencapai 100 %. Capaian kinerja ini sama dengan tahun sebelumnya, adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 tidak mempengaruhi capaian kinerja.

| No | SASARAN STRATEGIS/ OUTCOME                                                                   | INDIKATOR SASARAN                                                                           | SATUAN | RUMUS PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                           | PERHITUNGAN | REALISASI 2020 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                            | 3                                                                                           | 4      | 5                                                                                                                                                                                                                           | 6           | 7              |
| 1  | Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi                            | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi                        | Persen | Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan ekonomi yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan ekonomi yang disusun Bappeda Litbang dikali 100                                               | 9/9 x 100   | 100 %          |
| 2  | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | Persen | Jumlah Dokumen Bahan Pengambilan Kebijakan Sosial Budaya dan Pemerintahan yang disusun tepat waktu dibagi Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan sosial Budaya dan pemerintahan yang disusun Bappeda Litbang dikali 100 | 23/23 x 100 | 100 %          |
| 3  | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Fisik dan Prasarana            | Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang Fisik dan Prasarana            | Persen | Jumlah Dokumen Bahan Pengambilan Kebijakan Fisik dan Prasarana yang disusun tepat waktu Jumlah dokumen dibagi Jumlah dokumen bahan pengambilan kebijakan Fisik dan Prasarana yang disusun Bappeda Litbang dikali 100        | 7/7 x 100   | 100 %          |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Peningkatan Daerah                                     | Tingkat Kesesuaian Perencanaan dengan potensi daerah                                        | Persen | Jumlah Program Pengembangan Potensi Daerah dibagi Jumlah Program Dalam Perencanaan Daerah dikali 100                                                                                                                        | 38/38 x 100 | 100 %          |



### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penetapan Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja pada Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

| No  | Sasaran Strategis                                                                            | Indikator Kinerja                                                                          | Target |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|     |                                                                                              |                                                                                            | Satuan | Nilai |
| (1) | (2)                                                                                          | (3)                                                                                        | (4)    | (5)   |
| 1   | Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi                            | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi                       | Persen | 100 % |
| 2   | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintaha | Persen | 100 % |
| 3   | Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Fisik dan Prasarana            | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana           | Persen | 100 % |
| 4   | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah                                      | Tingkat Keseusaian Perencanaan Dengan Potensi Daerah                                       | Persen | 100 % |

### 2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Penetapan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja pada penetapan kinerja di BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Sebagai Berikut:

| No  | Sasaran Strategis                                                                        | Indikator Kinerja                                                                           | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                      | (3)                                                                                         | (4)    |
| 1   | Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi                        | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi                        | 100 %  |
| 2   | Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan | 100 %  |



| No  | Sasaran Strategis                                                             | Indikator Kinerja                                                                | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                           | (3)                                                                              | (4)    |
| 3   | Meningkatnya Keterpaduan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana | 100 %  |
| 4   | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah                       | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Dengan Potensi Daerah                             | 100 %  |
| 5   | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal Perangkat Daerah                  | Realisasi Anggaran                                                               | 92     |
|     |                                                                               | Nilai SAKIP                                                                      | B      |

| No  | Program                                                          | Anggaran                 |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                | <b>Rp. 820.584.000</b>   |
| 1.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Rp. 64.355.000           |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | Rp. 100.555.000          |
| 1.3 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 7.889.000            |
| 1.4 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                         | Rp. 526.530.000          |
| 1.5 | Penyediaan Jasa Publikasi                                        | Rp. 68.750.000           |
| 1.6 | Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah                           | Rp. 52.505.000           |
| 2   | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>         | <b>Rp. 1.280.921.000</b> |
| 2.1 | Pembangunan Gedung Kantor                                        | Rp. 33.315.000           |



| No       | Program                                                                               | Anggaran               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2.2      | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional                                                 | Rp. 50.125.000         |
| 2.3      | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor                                                     | Rp. 794.777.000        |
| 2.4      | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                                              | Rp. 281.600.000        |
| 2.5      | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional                                              | Rp. 97.348.000         |
| 2.6      | Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor                                        | Rp. 23.756.000         |
| <b>3</b> | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                                          | <b>Rp. 99.438.750</b>  |
| 3.1      | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu                                           | Rp. 99.438.750         |
| <b>4</b> | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Rp. 59.100.000</b>  |
| 4.1      | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Rp. 35.485.000         |
| 4.2      | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                                             | Rp. 23.615.000         |
| <b>5</b> | <b>Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>               | <b>Rp. 69.505.000</b>  |
| 5.1      | Pengurusan Administrasi Keuangan                                                      | Rp. 55.285.000         |
| 5.2      | Verifikasi Keuangan SKPD                                                              | Rp. 14.220.000         |
| <b>6</b> | <b>Program Peningkatan Sistem Perencanaan Perangkat Daerah</b>                        | <b>Rp. 451.562.600</b> |
| 6.1      | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan                                                    | Rp. 19.237.000         |
| 6.2      | Penyusunan Renja SKPD                                                                 | Rp. 141.071.100        |
| 6.3      | Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD                                                 | Rp. 45.554.000         |

| No       | Program                                                      | Anggaran                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.4      | Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)       | Rp. 106.420.000          |
| 6.5      | Penyusunan PK dan RA                                         | Rp. 14.130.000           |
| 6.6      | Penyusunan profil perangkat daerah                           | Rp. 13.798.000           |
| 6.7      | Penyelarasan Penanggulangan Kemiskinan Daerah                | Rp. 111.352.500          |
| <b>7</b> | <b>Program Pengembangan Penelitian dan Pengkajian</b>        | <b>Rp. 471.543.000</b>   |
| 7.1      | Pengembangan Penelitian Masyarakat                           | Rp. 291.050.000          |
| 7.2      | Kerjasama Pengembangan Penelitian Kebijakan Daerah           | Rp. 168.705.000          |
| 7.3      | Pengurusan Izin Penelitian                                   | Rp. 11.788.000           |
| <b>8</b> | <b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                | <b>Rp. 1.352.837.600</b> |
| 8.1      | Penyusunan RKPD                                              | Rp. 121.215.000          |
| 8.2      | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD                              | Rp. 268.900.750          |
| 8.3      | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RKPD                       | Rp. 55.416.000           |
| 8.4      | Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)                     | Rp. 23.371.050           |
| 8.5      | Penyusunan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)        | Rp. 124.811.050          |
| 8.6      | Penyusunan RPJMD                                             | Rp. 472.099.000          |
| 8.7      | Evaluasi Pelaksanaan RPJMD                                   | Rp. 67.486.000           |
| 8.8      | Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 219.538.750          |



| No        | Program                                                                                                          | Anggaran               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>9</b>  | <b>Program Peningkatan Koordinasi Dunia Usaha dan UMKM</b>                                                       | <b>Rp. 693.285.650</b> |
| 9.1       | Penyusunan Profil Ekonomi Daerah                                                                                 | Rp. 65.235.000         |
| 9.2       | Pendampingan Pengelolaan Bumdes                                                                                  | Rp. 41.155.000         |
| 9.3       | Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pedesaan                                                                    | Rp. 45.305.000         |
| 9.4       | Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai                                                                            | Rp. 346.379.200        |
| 9.5       | Penegakan Ketentuan Cukai Rokok                                                                                  | Rp. 76.978.050         |
| 9.6       | Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM                                                                   | Rp. 42.393.400         |
| 9.7       | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Dunia Usaha dan UMKM                                                  | Rp. 75.840.000         |
| <b>10</b> | <b>Program peningkatan koordinasi Pengembangan Pertanian dan Perikanan</b>                                       | <b>Rp. 243.414.000</b> |
| 10.1      | Pendampingan Pelaksanaan P2KPDT (Program Kawasan Produksi Daerah Tertinggal) Kawasan Produksi Daerah Tertinggal) | Rp. 52.485.000         |
| 10.2      | Penyelarasan Kerjasama Penanganan Daerah Rawan Pangan                                                            | Rp. 47.010.000         |
| 10.3      | Penyelarasan Kegiatan Pengusahaan Komoditas Unggulan                                                             | Rp. 54.786.000         |
| 10.4      | Penyelarasan Implementansi Rencana Tindak One Village One Produk                                                 | Rp. 40.123.000         |
| 10.5      | Penyelarasan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Perikanan                                  | Rp. 49.010.000         |
| <b>11</b> | <b>Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>                                  | <b>Rp. 510.624.500</b> |
| 11.1      | Penyelarasan Perencanaan SDA                                                                                     | Rp. 79.277.000         |
| 11.2      | Penyelarasan Perencanaan Kebencanaan                                                                             | Rp. 52.630.000         |

| No   | Program                                                                                                   | Anggaran   |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 11.3 | Monitoring dan Evaluasi Sub Bidang Pengwil dan SDA                                                        | Rp.        | 81.300.000         |
| 11.4 | Penyelarasan Pemenfaatan dan Pengendalian Perencanaan                                                     | Rp.        | 87.509.000         |
| 11.5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA                                    | Rp.        | 209.908.500        |
| 12   | Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Sarana dan Prasarana                                          | Rp.        | 300.393.500        |
| 12.1 | <b>Penyelarasan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Sub bidang sarana dan prasarana</b>                  | <b>Rp.</b> | <b>79.820.000</b>  |
| 12.2 | Penyelarasan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi masyarakat                                               | Rp.        | 51.732.500         |
| 12.3 | Penyelarasan DAK Infrastruktur                                                                            | Rp.        | 73.332.500         |
| 12.4 | Penyelarasan Jasa Konstruksi                                                                              | Rp.        | 53.041.500         |
| 12.5 | Penyelarasan Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                                              | Rp.        | 42.467.000         |
| 13   | <b>Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Sosial Budaya</b>                                          | <b>Rp.</b> | <b>325.806.688</b> |
| 13.1 | Pengendalian Rencana Aksi Sustainable Developmet Goals (RAD SDG'S) KSB<br>Development Goal (RAD SDGs) KSB | Rp.        | 39.873.186         |
| 13.2 | Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya                                             | Rp.        | 105.763.000        |
| 13.3 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan Budaya                                       | Rp.        | 54.111.000         |
| 13.3 | Penyelarasan Bidang Kesehatan                                                                             | Rp.        | 43.504.500         |
| 13.4 | Penyelarasan Bidang Pendidikan                                                                            | Rp.        | 33.170.002         |
| 13.5 | Penyelarasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan                                                          | Rp.        | 49.385.000         |
| 14   | Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pemerintah                                                    | Rp.        | 321.467.000        |



| No            | Program                                                           | Anggaran                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1          | Penyelarasan Perencanaan Bidang Pemerintahan                      | Rp. 74.712.500           |
| 14.2          | Penyelarasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah                      | Rp. 63.811.000           |
| 14.3          | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Bidang Pemerintahan | Rp. 52.879.500           |
| 14.4          | Penyelarasan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi            | Rp. 67.430.000           |
| 14.5          | Penyusunan Database Pemerintahan                                  | Rp. 62.634.000           |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                   | <b>Rp. 7.000.483.288</b> |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dengan membandingkan antara rencana capaian / target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tabel Rencana Strategis dan tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara rinci diuraikan dalam formulir Perjanjian Kinerja (PK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran. LKjIP ini disusun dalam rangka evaluasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan tahun 2020, sehingga Renstra yang digunakan sebagai acuan adalah Renstra tahun 2018 - 2021.

### 3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dan membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dilakukan pula dengan cara membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

#### 1. Sasaran 1

“Meningkatnya keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi”

- **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Sasaran ini menggambarkan Tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan bidang ekonomi. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini terdiri dari 1 (Satu) indikator yaitu:

- Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi Tahun 2020 tidak sama dengan yang ditargetkan dalam RENSTRA dengan realisasi 100 %. Jika dilihat capaian kinerja 2020 terhadap persentase realisasi tahun 2019, tidak terjadi penurunan kinerja.



- **Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya**

- **Efisiensi Anggaran**

- ✓ Tingkat Keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **936.699.650** dengan realisasi sebesar Rp. **691.772.318** dengan serapan sebesar **63,59%** sehingga efisiensi anggaran  $100\% - 63,59\% = 36,42\%$

- **Efisiensi Program/ Kegiatan**

- ✓ Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan, sehingga efisiensi Program/ kegiatan untuk indikator ini sebagai berikut:

|                             |   |                                                              |         |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---------|
| Efisiensi Program/ kegiatan | : | $\frac{13 \text{ kegiatan}}{13 \text{ kegiatan}} \times 100$ | = 100 % |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------|---------|

- **Efisiensi Waktu**

- ✓ Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan diselesaikan selama 12 bulan, sehingga efisiensi waktu untuk indikator ini sebagai berikut:

|                 |   |                                                        |        |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------|--------|
| Efisiensi Waktu | : | $\frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100$ | = 100% |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------|--------|

- **Efisiensi Jumlah SDM**

- ✓ Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang ekonomi tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan dilaksanakan oleh 8 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 6 staf), pada tahun 2019 indikator kinerja ini didukung oleh 2 program dan 10 kegiatan dilaksanakan oleh 9 orang ( 1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 6 Staf ). sehingga efisiensi Jumlah SDM untuk indikator ini sebagai berikut:

|                      |   |                                                      |        |
|----------------------|---|------------------------------------------------------|--------|
| Efisiensi Jumlah SDM | : | $\frac{9 \text{ orang}}{9 \text{ orang}} \times 100$ | =100 % |
|----------------------|---|------------------------------------------------------|--------|

- **Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tahun 2020, Program dan Kegiatan untuk Indikator Kinerja dalam **Sasaran 1** sudah seluruhnya dianggarkan dalam DPA/DPPA namun karena terjadi pandemi covid 19 dimana terdapat kegiatan penyusunan data base sim ekonomi yang harus di refocusing anggarannya untuk penanganan covid 19 sehingga capaian kinerja tidak bisa hasil maksimal sesuai target di Renstra.

**2. Sasaran 2**

“Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

• **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Sasaran 2 Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang sosial budaya dan pemerintahan. Indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur sasaran 2 ini ada 1 (satu) yaitu:

- Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan Tahun 2020 dapat direalisasikan 100 %.

• **Analisis atas Efisiensi Sumber Daya**

- **Efisiensi Anggaran**

Tingkat Keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 11 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **647.273.688** dengan realisasi sebesar Rp. **364.663.892** dengan serapan sebesar **56,31 %** sehingga efisiensi anggaran  $100\% - 56,31\% = 43,69 \%$

- **Efisiensi Program/ Kegiatan**

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 11 kegiatan, pada tahun 2019 indikator kinerja ini didukung oleh 2 program



dan 8 kegiatan, dengan kegiatan yang berbeda. sehingga efisiensi Program/ kegiatan untuk indikator ini sebagai berikut:

|                             |   |                                                            |         |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------|
| Efisiensi Program/ kegiatan | : | $\frac{8 \text{ kegiatan}}{8 \text{ kegiatan}} \times 100$ | = 100 % |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------|

- **Efisiensi Waktu**

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 11 kegiatan diselesaikan selama 12 bulan, pada tahun 2019 indikator kinerja ini didukung oleh 2 program dan 8 kegiatan juga diselesaikan selama 12 bulan. sehingga efisiensi waktu untuk indikator ini sebagai berikut:

|                 |   |                                                        |         |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------|---------|
| Efisiensi Waktu | : | $\frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} \times 100$ | = 100 % |
|-----------------|---|--------------------------------------------------------|---------|

- **Efisiensi Jumlah SDM**

Tingkat tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 11 kegiatan dilaksanakan oleh 10 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 7 staf), pada tahun 2019 indikator kinerja ini didukung oleh 2 program dan 8 kegiatan dilaksanakan oleh 8 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 5 Staf). sehingga efisiensi Jumlah SDM untuk indikator ini sebagai berikut:

|                      |   |                                                      |         |
|----------------------|---|------------------------------------------------------|---------|
| Efisiensi Jumlah SDM | : | $\frac{8 \text{ orang}}{8 \text{ orang}} \times 100$ | = 100 % |
|----------------------|---|------------------------------------------------------|---------|

- **Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tahun 2020, Program dan Kegiatan untuk Indikator Kinerja dalam **Sasaran 2** sudah seluruhnya dianggarkan dalam DPA/DPPA namun terjadinya pandemi covid 19 sehingga beberapa kegiatan mengalami *refocusing* anggaran untuk penanganan covid 19, namun semua kegiatan

tetap bisa di laksanakan walaupun capaian kinerja tidak mencapai target yang ada di RENSTRA.

### 3. Sasaran 3

“Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang fisik dan prasarana”

- **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Sasaran 3 Tingkat keterpaduan perencanaan pembangunan dalam bidang fisik dan prasarana. Indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur sasaran 3 ini ada 1 (satu) yaitu:

- Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana Tahun 2020 mendekati dengan yang ditargetkan dalam RENSTRA dengan realisasi 100 %.

- **Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya**

- **Efisiensi Anggaran**

Tingkat Keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 10 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. **811.018.000** dengan realisasi sebesar Rp. **516.581.240** dengan serapan sebesar **61 %** sehingga efisiensi anggaran  $100\% - 61\% = 39\%$

- **Efisiensi Program/ Kegiatan**

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 10 kegiatan, sehingga efisiensi Program/ kegiatan untuk indikator ini sebagai berikut:

|                             |   |             |       |         |
|-----------------------------|---|-------------|-------|---------|
| Efisiensi Program/ kegiatan | : | 10 kegiatan | x 100 | = 100 % |
|                             |   | 10 kegiatan |       |         |

- **Efisiensi Waktu**

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 10 kegiatan diselesaikan selama 12 bulan, pada tahun 2019 indikator kinerja ini didukung oleh 2 program dan 9 kegiatan juga diselesaikan selama 12 bulan. sehingga efisiensi waktu untuk indikator ini sebagai berikut:



|                 |   |                                             |              |            |
|-----------------|---|---------------------------------------------|--------------|------------|
| Efisiensi Waktu | : | $\frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}}$ | $\times 100$ | $= 100 \%$ |
|-----------------|---|---------------------------------------------|--------------|------------|

- **Efisiensi Jumlah SDM**

Tingkat keterpaduan program dan kegiatan pengembangan bidang fisik dan prasarana tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 10 kegiatan dilaksanakan oleh 10 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 7 staf), sehingga efisiensi Jumlah SDM untuk indikator ini sebagai berikut:

|                      |   |                                             |              |            |
|----------------------|---|---------------------------------------------|--------------|------------|
| Efisiensi Jumlah SDM | : | $\frac{10 \text{ orang}}{10 \text{ orang}}$ | $\times 100$ | $= 100 \%$ |
|----------------------|---|---------------------------------------------|--------------|------------|

- **Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tahun 2020, Program dan Kegiatan untuk Indikator Kinerja dalam **Sasaran 3** sudah seluruhnya dianggarkan dalam DPA/DPPA namun karena terjadi pandemic Covi 19 sehingga banyak belanja yang tidak bisa dilaksanakan dan refocusing anggarannya untuk kegiatan penanganan Covid 19.

**4. Sasaran 4**

“Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah”

• **Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Sasaran 4: “meningkatkan kualitas perencanaan dan penelitian daerah”. Indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur sasaran 4 ini ada 1 (satu) yaitu:

- Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah Tahun 2020 tidak sama dengan yang ditargetkan dalam RENSTRA dengan realisasi 100 %.

• **Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya**

- **Efisiensi Anggaran**

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan dengan pagu sebesar Rp.

1.824.380.600 dengan realisasi sebesar Rp. 1.546.730.140 dengan serapan sebesar 86 % sehingga efisiensi anggaran  $100\% - 86\% = 14\%$

- **Efisiensi Program/ Kegiatan**

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan, pada tahun 2019 indikator kinerja ini didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan, dengan kegiatan yang sama. sehingga efisiensi Program/ kegiatan untuk indikator ini sebagai berikut:

|                             |   |                                                   |       |         |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------|-------|---------|
| Efisiensi Program/ kegiatan | : | $\frac{13 \text{ kegiatan}}{13 \text{ kegiatan}}$ | x 100 | = 100 % |
|-----------------------------|---|---------------------------------------------------|-------|---------|

- **Efisiensi Waktu**

Tingkat kesesuaian perencanaan tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan diselesaikan selama 12 bulan, pada tahun 2019 indikator kinerja ini didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan juga diselesaikan selama 12 bulan. sehingga efisiensi waktu untuk indikator ini sebagai berikut:

|                 |   |                                             |       |         |
|-----------------|---|---------------------------------------------|-------|---------|
| Efisiensi Waktu | : | $\frac{12 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}}$ | x 100 | = 100 % |
|-----------------|---|---------------------------------------------|-------|---------|

- **Efisiensi Jumlah SDM**

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan potensi daerah tahun 2020 didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan dilaksanakan oleh 10 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 7 staf), pada tahun 2019 indikator kinerja ini didukung oleh 2 program dan 13 kegiatan dilaksanakan oleh 10 orang (1 orang Kepala Bidang, 2 Kasubbid, dan 7 Staf ). sehingga efisiensi Jumlah SDM untuk indikator ini sebagai berikut:

|                      |   |                                             |       |         |
|----------------------|---|---------------------------------------------|-------|---------|
| Efisiensi Jumlah SDM | : | $\frac{10 \text{ orang}}{10 \text{ orang}}$ | x 100 | = 100 % |
|----------------------|---|---------------------------------------------|-------|---------|



- **Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja**
- Tahun 2020, Program dan Kegiatan untuk Indikator Kinerja dalam **Sasaran 4** sudah seluruhnya dianggarkan dalam DPA/DPPA namun terjadinya Pandemi Covid 19 di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan daerah tidak bisa dilaksanakan sehingga anggaran untuk kegiatan tersebut *direfocusing* untuk kegiatan penganggulan pandemic Covid 19.

### 3.2. Realisasi Anggaran

BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2020 mempunyai 2 dokumen pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD yaitu : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: 37 Tahun Tanggal 10 Desember 2019 dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.940.553.158.- (*Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Delapan*) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.748.153.158.- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Delapan*) dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 8.192.400.000.- (*Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu*).

Yang mana di Pertengahan triwulan III (Anggaran Perubahan) mendapat Tambahan anggaran untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 944.657.000,- (*Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Tuju Ribu*) dan untuk Belanja Tidak Langsung mendapat tambahan sebesar Rp. 1.191.916.712,- (*Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Belas*) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor: 292 Tahun 2020 Tanggal 4 September 2020 dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga Pagu Anggaran Belanja Langsung dari Rp. 8.192.400.000 (*Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu*) Menjadi Rp. 7.000.483.288,- (*Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan*) Dan Belanja Tidak Langsung dari Rp. 2.748.153.158,- (*Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Delapan*) menjadi Rp. 3.692.640.815 (*Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Belas*).

| Uraian                        | Jumlah (Rp.)          |                       | Bertambah/ (berkurang) |             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
|                               | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | (Rp)                   | %           |
| (1)                           | (2)                   | (3)                   | (4)                    | (5)         |
| <b>BELANJA</b>                | <b>10.940.553.158</b> | <b>10.693.124.103</b> | <b>(247.429.055)</b>   | <b>2,26</b> |
| BELANJA LANGSUNG              | 8.192.400.000         | 7.000.483.288         | (1.191.916.712)        | 14,55       |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG        | 2.748.153.158         | 3.692.640.815         | 944.487.657            | 34,37       |
| <b>BERTAMBAH/ (BERKURANG)</b> |                       |                       | <b>(247.429.055)</b>   | <b>2,26</b> |



Pada Akhir tahun 2020, Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat telah melaksanakan semua program dan kegiatan yang tertera didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020 maupun yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020 dengan total 14 (Empat Belas) Program dan 71 (Tujuh Puluh Satu) kegiatan dengan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 9.003.781.691.- (*Sembilan Milyar Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu*) atau terserap sebesar 84,20 % sehingga sisa anggaran yang tidak diserap senilai Rp.1.689.342.412.- (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Belas*) atau tidak terserap sebesar 15,80 %.

Perincian dari Pagu Anggaran yang diserap akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

## TAHUN ANGGARAN 2020

| No  | Sasaran                                  | Indikator Kinerja Utama        | Program/ Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                      | Satuan | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian Kinerja |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|-----------------|
| (1) | (2)                                      | (3)                            | (4)                                                                  | (5)                                                                                      | (6)    | (7)           | (8)                | (9)             |
| 1   | Mewujudkan Pelayanan Internal Yang Prima | Realisasi Anggaran/Nilai SAKIP | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | Cakupan Administrasi Sesuai Pelayanan Prima                                              | Rupiah | 820.584.000   | 733.832.212        | 89,43%          |
|     |                                          |                                | 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | input : Jumlah dana<br>output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik | Rupiah | 64.355.000    | 47.003.212         | 73,04%          |
|     |                                          |                                | 2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                  | input : Jumlah dana<br>output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor                       | Rupiah | 100.555.000   | 100.055.000        | 99,50%          |
|     |                                          |                                | 3 4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | input : Jumlah Dana<br>output : Sarana Instalasi Listrik Yang Terpasang                  | Rupiah | 7.889.000     | 7.389.000          | 100%            |
|     |                                          |                                | 4 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran                           | input : Jumlah Dana<br>output : Jasa Administrasi Perkantoran Tersedia                   | Rupiah | 526.530.000   | 516.730.000        | 98,14%          |
|     |                                          |                                | 5 Penyediaan Jasa Publikasi                                          | input : Jumlah Dana<br>output : Jasa Publikasi Perkantoran Tersedia                      | Rupiah | 68.750.000    | 18.250.000         | 26,55 %         |
|     |                                          |                                | 6 Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah                             | input : Jumlah Dana<br>output : Pengelolaan Arsip Tersedia                               | Rupiah | 52.505.000    | 43.905.000         | 83,62%          |
|     |                                          |                                | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                    | Tingkat optimalisasi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran                          | Rupiah | 1.280.921.000 | 1.246.417.874      | 97,31%          |
|     |                                          |                                |                                                                      |                                                                                          | Persen | 100           | 100                | 100%            |
|     |                                          |                                |                                                                      |                                                                                          |        |               |                    |                 |
|     |                                          |                                |                                                                      |                                                                                          |        |               |                    |                 |



LKJIP  
2020

|      |      |                |      |
|------|------|----------------|------|
| 1992 | 1981 | <b>BAB III</b> | 1984 |
|------|------|----------------|------|

LKjIP  
2020

BAE III



| No  | Sasaran                                                 | Indikator Kinerja Utama                              | Program/ Kegiatan                                        | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                                   | Satuan                                                    | Pagu Anggaran      | Realisasi Anggaran | Capaian Kinerja |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| (1) | (2)                                                     | (3)                                                  | (4)                                                      | (5)                                                                                                   | (6)                                                       | (7)                | (8)                | (9)             |
|     |                                                         |                                                      | 3 Penyusunan RKA/RKAP dan DPADPPA SKPD                   | Input : Jumlah Dana<br>output : Tersusunnya RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD                                | Rupiah<br>Dokumen                                         | 45.554.000<br>4    | 39.354.000<br>4    | 86,39 %<br>100% |
|     |                                                         |                                                      | 4 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) | Input : Jumlah Dana<br>output : Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)               | Rupiah<br>Dokumen                                         | 106.420.000<br>1   | 33.868.024<br>1    | 31,82%<br>100%  |
|     |                                                         |                                                      | 5 Penyusunan PK dan RA                                   | Input : Jumlah Dana<br>output : Tersusunnya Perjanjian Kinerja SKPD                                   | Rupiah<br>Dokumen                                         | 14.130.000<br>1    | 14.130.000<br>1    | 100 %<br>100%   |
|     |                                                         |                                                      | 6 Penyusunan Profil Perangkat Daerah                     | Input : Jumlah Dana<br>output : Tersusunnya Profil Perangkat Daerah                                   | Rupiah<br>Laporan                                         | 13.798.000<br>1    | 12.673.000<br>1    | 91,85 %<br>100% |
|     |                                                         |                                                      | 8 Penyelesaian Penangguhlangan Kemiskinan Daerah         | Input : Jumlah Dana<br>Output : Tersusunnya Laporan Kegiatan                                          | Rupiah<br>Laporan                                         | 111.352.500<br>12  | 38.102.500<br>12   | 34,22 %<br>100% |
|     |                                                         |                                                      | Program Pengembangan Penelitian dan Pengkajian           | Tingkat Pengkajian dan Pengembangan Penelitian Daerah                                                 | Rupiah                                                    | 471.543.000        | 417.198.000        | 88,48 %         |
|     |                                                         |                                                      |                                                          |                                                                                                       | Persen                                                    | 100                | 100                | 100%            |
|     |                                                         |                                                      |                                                          |                                                                                                       | Input : Jumlah Dana                                       | 291.050.000        | 252.975.000        | 86,92 %         |
|     |                                                         |                                                      |                                                          |                                                                                                       | output : Tersedianya hasil penelitian/Kajian/Karya ilmiah | 150                | 150                | 100%            |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penelitian Daerah | Tingkat Kesesuaian Perencanaan Dengan Potensi Daerah | 1 Pengembangan Penelitian Masyarakat                     | input : Jumlah Dana<br>output : Tersedianya hasil penelitian/Kajian/Karya ilmiah                      | Rupiah<br>Laporan                                         | 168.705.000<br>150 | 158.365.000<br>150 | 93,87 %<br>100% |
|     |                                                         |                                                      | 2 Kejasama Pengembangan Penelitian Kebijakan Daerah      | output : Terfasilitasinya Kejasama Pembangunan Penelitian Kebijakan Daerah Dengan dunia usaha/lembaga | Lembaga                                                   | 4                  | 4                  | 100%            |
|     |                                                         |                                                      | 3 Pengurusan Ijin Penelitian                             | input : Jumlah Dana<br>output : Tersedia Administrasi Penelitian                                      | Rupiah<br>Bulan                                           | 11.788.000<br>200  | 5.868.000<br>200   | 49,78 %<br>100% |

LKjIP  
2020

BAR III



| No                                                                    | Sasaran                                                              | Indikator Kinerja Utama                                                              | Program/ Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan | Satuan      | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian Kinerja |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| (1)                                                                   | (2)                                                                  | (3)                                                                                  | (4)                                                       | (5)                                 | (6)         | (7)           | (8)                | (9)             |
| Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Ekonomi | Tingkat Keterpaduan Program dan Kegiatan Pengembangan Bidang Ekonomi | Program Peningkatan Koordinasi Dunia Usaha dan UMKM                                  | Tingkat keterpaduan program/kegiatan dunia usaha dan umkm | Rupiah                              | 693.285.650 | 589.051.947   | 84,97 %            |                 |
|                                                                       |                                                                      |                                                                                      |                                                           | Persen                              | 100         | 100           | 100%               |                 |
|                                                                       |                                                                      |                                                                                      | 1 Penyusunan Profil Ekonomi Daerah                        | Input : Jumlah Dana                 | Rupiah      | 65.235.000    | 51.605.000         | 79,11 %         |
|                                                                       |                                                                      |                                                                                      | output : Tersusunnya Profil Ekonomi Daerah                | Dok                                 | 1           | 1             | 100%               |                 |
|                                                                       |                                                                      | 2 Pendampingan Pengelolaan Bumdes                                                    | Input : Jumlah Dana                                       | Rupiah                              | 41.155.000  | 31.815.315    | 77,31 %            |                 |
|                                                                       |                                                                      | output : Terlaksananya Pendampingan Pengelolaan BUMDES                               | Laporan                                                   | 4                                   | 4           | 100%          |                    |                 |
|                                                                       |                                                                      | 3 Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pedesaan                                      | Input : Jumlah Dana                                       | Rupiah                              | 45.305.000  | 22.440.000    | 100%               |                 |
|                                                                       |                                                                      | output : Tersusunnya Hasil Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pedesaan             | Laporan                                                   | 4                                   | 4           | 100%          |                    |                 |
|                                                                       |                                                                      | 4 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai                                              | Input : Jumlah Dana                                       | Rupiah                              | 346.379.200 | 320.649.200   | 92,57 %            |                 |
|                                                                       |                                                                      | output : Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan di bidang cukai                         | Orang                                                     | 750                                 | 750         | 100%          |                    |                 |
|                                                                       |                                                                      | 5 Penegakan Ketentuan Cukai Rokok                                                    | Input : Jumlah Dana                                       | Rupiah                              | 76.978.050  | 71.268.050    | 92,58 %            |                 |
|                                                                       |                                                                      | output : Terlaksananya Penegakan Ketentuan Cukai Rokok                               | Orang                                                     | 15                                  | 15          | 92,58 %       |                    |                 |
|                                                                       |                                                                      | 6 Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM                                     | Input : Jumlah Dana                                       | Rupiah                              | 42.393.400  | 31.073.400    | 100%               |                 |
|                                                                       |                                                                      | output : Terlaksananya Penyelarasan Pembangunan Koperasi UMKM dan IKM                | Laporan                                                   | 4                                   | 4           | 100%          |                    |                 |
|                                                                       |                                                                      | 7 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Dunia Usaha dan UMKM                    | Input : Jumlah Dana                                       | Rupiah                              | 75.840.000  | 60.200.982    | 79,38%             |                 |
|                                                                       |                                                                      | output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Dunia UMKM dan IKM | Laporan                                                   | 4                                   | 4           | 100%          |                    |                 |
| Program Peningkatan Koordinasi Pengembangan Pertanian dan Perikanan   | tingkat keterpaduan program dan kegiatan pertanian dan perikanan     | Rupiah                                                                               | 243.414.000                                               | 102.720.371                         | 42,20 %     |               |                    |                 |
|                                                                       |                                                                      | Persen                                                                               | 100                                                       | 100                                 | 100%        |               |                    |                 |
| 1 Pendampingan Pelaksanaan P2K PDT                                    | Input : Jumlah Dana                                                  | Rupiah                                                                               | 52.485.000                                                | 342.328.166                         | 65,41 %     |               |                    |                 |



**LKIP**  
**2020**

|        |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| BA III | BA II | BA I | BA IV |
|--------|-------|------|-------|



**BAB III**



BAR I BAR III BAR IV



LKjIP  
2020

| No  | Sasaran | Indikator Kinerja Utama | Program/ Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan                                                                  | Satuan             | Pagu Anggaran   | Realisasi Anggaran | Capaian Kinerja |
|-----|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| (1) | (2)     | (3)                     | (4)                                                       | (5)                                                                                                  | (6)                | (7)             | (8)                | (9)             |
|     |         |                         | 4. Penyelarasan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | input : Jumlah Dana<br>output : Terlaksananya penyelarasan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Rupiah<br>Laporan  | 67.430.000<br>4 | 30.251.184<br>4    | 44,86 %<br>100% |
|     |         |                         | 5. Penyusunan Data Base Pemerintahan                      | input : Jumlah Dana<br>output : Data Base pemerintahan tersusun                                      | Rupiah<br>Database | 62.634.000<br>1 | 31.694.000<br>1    | 50,60 %<br>100% |

## BAB IV PENUTUP

Program dan kegiatan perangkat daerah disusun dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2020. Capaian kinerja perangkat daerah yang merupakan *output* dan *outcome* pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan nilai dukung perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi kinerja perangkat daerah pada tahun 2020. Secara garis besar, capaian kinerja perangkat daerah yang mencakup 14 program dan 68 kegiatan mencapai 100% dengan dukungan serapan anggaran sebesar 84,20%.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi bagian dari manajemen kinerja perangkat daerah. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sumbawa Barat.